

## Format Sop Pemerintahan

Panduan Mudah Menyusun SOP  
 Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)  
 Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Perusahaan: Mengelola Bisnis yang Fokus terhadap Strategi  
 Birokrasi pemerintah Orde Baru  
 Pelayanan Prima Instansi Pemerintah  
 Standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).  
 Menyusun Sop  
 Mudah Menyusun SOP  
 The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities  
 Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi  
 Etika Administrasi Publik  
 Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik  
 KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB  
 Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi  
 Penataan birokrasi publik memasuki era millenium  
 KOMPENSASI & SOP PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA Berdasarkan Aturan Pemerintah  
 Usaha untuk menemukan sistim pemerintahan daerah jang akseptabel dan workabel  
 Petunjuk Praktis Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (K/L/Pemda)  
 SOP Biro Administrasi Pimpinan sebagai juru bicara pimpinan Pemprov Jawa Barat  
 Kemampuan minimal seorang birokrat  
 Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)  
 Manajemen pemerintahan  
 Panduan praktis menyusun Standard Operating Procedures (SOP) instansi pemerintah  
 Administrasi negara  
 Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas  
 Panduan Praktis Menyusun SOP  
 Manajemen Pelaporan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara  
 Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP  
 Step by Step Lancar Membuat SOP  
 Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah  
 Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan  
 The Complete Business Process Handbook  
 Manajemen Arsip Dinamis  
 Pengaturan koordinasi pemerintahan di daerah  
 Birokrasi pemerintahan Indonesia  
 SANKRI  
 Peluang penerapan new public management untuk kabupaten di Indonesia  
 Hukum Administrasi Negara  
 Administrasi publik baru Indonesia  
 SOP : Standar Operasioal Prosedur Instansi Pemerintah

*Format Sop Pemerintahan*

*Downloaded from dev2.bryanu.edu by guest*

### STONE MONTGOMERY

Panduan Mudah Menyusun SOP Penebar PLUS+  
 Operating Procedure) saat menjalankan operasional perusahaannya. Bahkan, tidak sedikit di antaranya justru sama sekali belum mengenal apa itu SOP. Padahal, dengan penerapan SOP, jalannya operasional perusahaan akan jauh lebih efisien, baik dari segi waktu, proses, tenaga maupun biaya operasional. Lebih jauh lagi, dengan semakin sengitnya persaingan usaha dewasa ini, setiap perusahaan akan berupaya untuk bekerja secara lebih terukur, baik dari segi proses kerjanya, alur kerjanya maupun metode kerja yang dipergunakannya; demi upaya peningkatan pelayanan kepada setiap pelanggannya. Salah satu upaya yang sangat diunggulkan dalam peningkatan pelayanan pelanggan itu adalah penerapan SOP (Standard Operating Procedure) pada setiap unit kerja dari perusahaan termaksud. Buku ini akan memandu Anda dalam membuat SOP untuk berbagai bentuk perusahaan. Selain membuat SOP, buku ini juga memaparkan dokumen-

dokumen (form-form) apa saja yang diperlukan dalam suatu prosedur. Standard Operating Procedure SOP Salam Penebar Swadaya Grup & RAS  
**Proceedings of the 3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)** Penerbit Nauli Media  
 The New Order government bureaucracy.  
*Penyusunan Proses Bisnis dan SOP Perusahaan: Mengelola Bisnis yang Fokus terhadap Strategi*  
 Kencana  
 BUKU yang ada dihadapan pembaca merupakan kelanjutan dari buku saya yang terdahulu pemerintahan yang baik melalui penerapan tata kelola dan keabsahan pemerintahan. Dalam buku yang kedua ini dengan mengambil judul pemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintahan diharapkan bisa memberikan gambaran seperti apa konsep pemerintahan yang bertanggungjawab itu dijalankan atau dilakukan. Dengan kata lain, pemerintahan yang bertanggungjawab menjadi tuntutan mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Kepemerintahan yang bertanggungjawab

memberi batasan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sesuai dengan dasar tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Dalam hukum administrasi pemerintahan jelas disebutkan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dalam arti, bahwa semua perbuatan atau tindakan hukum pemerintahan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kewenangannya. Dalam buku kedua ini saya ingin memberikan penekanan pada tiga hal apabila pemerintahan yang bertanggungjawab itu dapat dilakukan atau dijalankan dengan baik dan benar yakni, berkenaan dengan seperti apa pemerintahan yang bertanggungjawab itu dilakukan. Untuk mengurai hal tersebut menurut saya perlu dilakukan pembenahan birokrasi pemerintahan melalui kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan. Sedangkan, untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan itu sudah bertanggungjawab ataukah tidak maka perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintahan.

**Birokrasi pemerintah Orde Baru** PT Kanisius

Buku yang berjudul “Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik” sebagai bagian dari

penelitian yang dilaksanakan tahun 2016. Buku ini terselesaikan tentu tidak hanya karena penulis telah berusaha maksimal akan tetapi karena bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu administrasi publik dan lainnya sehingga dapat menjadi bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di dalam buku ini mengkaji tentang pemerintahan desa dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Penulisan buku ini sebagai sumbangan bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah* Global Eksekutif Teknologi

Persaingan bisnis makin mengarah kepada persaingan global. Krisis ekonomi di luar negeri, suka tidak suka, cepat atau lambat, merupakan suatu kepastian akan berdampak kepada perekonomian dalam negeri dan akhirnya memengaruhi kinerja bisnis setiap organisasi. Dari waktu ke waktu, kita menyaksikan produk dengan berbagai merek silih berganti merebut pangsa pasar. Pada akhirnya, semua alasan membeli suatu produk dengan merek tertentu akan bermuara kepada nilai tambah (value added). Produsen yang mampu menghasilkan nilai tambah secara terus-menerus adalah produsen yang akan menjadi pemenang dalam persaingan, sehingga persaingan sesungguhnya bukanlah persaingan terhadap pesaing, melainkan persaingan dalam menghasilkan nilai tambah kepada pelanggan. Bagaimana rangkaian aktivitas suatu organisasi mengasihkan nilai tambah yang akan dirasakan oleh pelanggannya? Bagaimana merumuskan nilai tambah di tingkat perancangan, dan bagaimana mewujudkannya di tingkat pelaksanaan? Hal inilah yang menjadi topik pembahasan dalam buku ini. Buku ini ditulis dengan maksud untuk memberikan ide dan gagasan dalam bentuk metode untuk membangun keselarasan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang fokus terhadap strategi melalui proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Suatu organisasi perlu bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan proses bisnis yang telah disusun. Selanjutnya, SOP menjadi acuan bagi setiap divisi dalam organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar dan selaras.

**Standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).** Phinatama Media

This is an open access book. Still related to the big theme of reinforcement the SDG's at the previous conference, we try to invite academics and researchers in the world to participate in the 3rd Borobudur International Symposium 2021 (3rd BIS 2021). As we know, The COVID-19 pandemic and its impact on all 17 SDGs have demonstrated that what began as a health catastrophe swiftly transformed into a human and socioeconomic crisis. In September 2019, the UN Secretary-General urged all sectors of society to mobilize for a decade of action on three fronts: global action to ensure increased leadership, increased resources, and smarter solutions for the Sustainable Development Goals; local action to embed the necessary transitions into governments' policies, budgets, institutions, and regulatory frameworks; and international action to ensure greater leadership, increased resources, and smarter solutions for the Sustainable Development Goals. Especially in 3rd BIS 2021, we brought up "Decade of Action towards Environmental Issues: Advancing the Innovation to Recover our Planet" as main theme. The conference will be held on Wednesday, December 15, 2021 in Magelang, Central Java, Indonesia. Scope includes Art & Linguistics, Communication, Economics, Education, Government Studies, Health Administration, Hospitality, International Relations, Law, Pharmacy, Political Studies, Psychology, Public Health, Religious Studies, Sociology, Health Sciences.

*Menyusun Sop* Springer Nature

Buku pelayanan prima instansi pemerintah ini mencoba mengungkapkan secara kritis bagaimana kondisi sebenarnya pelayanan prima di instansi pemerintah di Indonesia. di pahami pelayanan prima merupakan terjemahan istilah "excellent service" yang secara harfiah artinya pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat memuaskan. Disebut sangat memuaskan atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Sejatinya hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat. Di Indonesia sebagaimana diketahui bahwa pelayanan publik khususnya di kantor-kantor pemerintah belum semua mencapai pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan. Terutama instansi-instansi pelayanan publik di pelosok-pelosok Tanah Air. Karena itu juga keterbatasan yang ada sehingga pelayanan prima belum memuaskan. Kendati demikian, banyak juga instansi-instansi pelayanan publik pemerintah di perkotaan telah mampu menerapkan pelayanan prima. Buku persembahan penerbit

PrenadaMediaGroup

*Mudah Menyusun SOP* Rajagrafindo Persada

Standard Operating Procedures of government administration in Indonesia.

**The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities** PT Kanisius

Reforming public administration and bureaucracy at central and local government level in Indonesia.

Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi Anak Hebat Indonesia

Setiap perusahaan menginginkan tujuannya dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP) atau Sistem Tata Kerja. SOP merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik. Sistem Tata Kerja juga merupakan salah satu referensi yang dapat digunakan dalam menangani temuan audit akibat kesalahan, kelalaian, dan kecurangan, serta merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan keluhan, konflik atau perselisihan di dalam organisasi. Buku ini akan memandu Anda memahami apa dan bagaimana menyusun SOP atau Sistem Tata Kerja di dalam organisasi atau perusahaan. Selain menerangkan mengenai seluk-beluk SOP atau Sistem Tata Kerja, buku ini juga menyajikan cara-cara mudah dalam membuat dan mengimplementasikannya, baik untuk organisasi kecil maupun bisnis perseorangan. salam PENEBAR PLUS+ toko buku online murah - penebar-swadaya.net

**Etika Administrasi Publik** umsu press

KOMPENSASI & SOP PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA Berdasarkan Aturan Pemerintah Penulis :

123meimei\_ Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5525-17-4 Terbit : September 2021

www.guepedia.com Sinopsis : Karyawan yang mengalami PHK baik secara normatif dari segi sukarela maupun tidak, ada kompensasi yang diterima oleh karyawan PHK, di antaranya: Uang Penggantian Hak (UPH), Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa kerja (UPMK), Uang Pisah, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan. Namun yang perlu diingat adalah sebab/ alasan seseorang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bahkan di-PHK, karena setiap alasan telah diatur oleh Pemerintah berdasarkan yang telah kami uraikan diatas memiliki besaran yang berbeda bahkan ada yang tidak berhak diberikan kepada karyawan. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai prosedur keluar perusahaan. Setiap perusahaan memiliki prosedur bagi karyawan yang keluar. Tentu saja itu dipertimbangkan melalui sebab ia keluar. Karena ada perbedaan yang lebih spesifik dal hal urusan administrasinya. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

*Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik* Gramedia Pustaka Utama

Pelaku dunia usaha atau bisnis tentu menginginkan usaha yang dia lakukan lancar dan menemui kesuksesan. Saat menunjang kegiatan usaha berjalan efektif dan efisien, diperlukan satu panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap unit perusahaan. Tanpa adanya panduan yang jelas, tugas dan fungsi tiap elemen di dalam sebuah perusahaan akan berjalan lancar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan para pelaku usaha adalah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) untuk menjalankan bisnisnya. Secara sederhana, SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. SOP juga dapat diartikan sebagai panduan mengoperasionalkan kerja perusahaan baik secara teknis maupun nonteknis. SOP tidak hanya berlaku bagi usaha berskala besar. Usaha berskala kecil dan menengah pun ada baiknya menerapkan SOP. Standard Operating Procedures (SOP) berperan sebagai panduan hasil kerja yang ingin diraih oleh suatu perusahaan maupun instansi. Penerapan SOP akan menunjukkan hasil kerja, hasil produk, dan proses pelayanan suatu perusahaan. Penerapan SOP juga merupakan faktor yang dapat mengukur sukses tidaknya kegiatan operasional suatu bidang usaha. Dalam buku ini, akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, hingga tata cara pembuatan SOP. Buku ini juga menyediakan beberapa contoh SOP yang bisa dimanfaatkan pembaca maupun yang ingin membuat SOP. Selain itu, perlu untuk diketahui, SOP tidak hanya digunakan dalam dunia usaha yang profit, akan tetapi SOP juga digunakan oleh lembaga non profit atau instansi yang bergerak di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, penulis juga menyajikan berbagai contoh SOP yang dapat diterapkan oleh perusahaan tersebut. Selamat mempelajari seluk beluk SOP. Susunlah SOP sesuai dengan ciri dan kebutuhan usaha Anda. Semoga buku ini dapat membantu dan menambah pengetahuan mengenai penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedures (SOP). \*\*\* Buku persembahan penerbit Huta Publisher ini dapat jadi pedoman Anda, para entrepreneur atau pengusaha.

**KEPEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB** Delta Pijar Khatulistiwa

Dasar Hukum Pengelolaan Obat di Puskesmas, Perencanaan Obat di Puskesmas, Pengadaan Obat di Puskesmas, Penerimaan Obat di Puskesmas, Penyimpanan Obat di Puskesmas, Pendistribusian Obat di Puskesmas, Pengendalian Obat di Puskesmas, Pencatatan dan Pelaporan Obat di Puskesmas, Monitoring dan Evaluasi Obat di Puskesmas, Pengelolaan Obat Program Pemerintah di Puskesmas, Dokumen Teknis Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas (Contoh SK, SOP, Pedoman, Panduan, dan KAK).

*Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi* Morgan Kaufmann

Buku ini berisi petunjuk praktis penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, sesuai dengan PerMenPANRB nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Buku ini merupakan pelengkap buku yang telah terbit sebelumnya berjudul Pemetaan Bisnis Proses dan Penyusunan SOP Instansi Pemerintah. Kekuatan buku ini adalah memandu pembaca mengikuti langkah demi langkah untuk menyusun peta proses bisnis, disertai dengan contoh-contoh. Petunjuk menggambarkan peta proses bisnis menggunakan Microsoft Visio disajikan untuk mempermudah pembaca menggambarkan peta proses bisnis, baik dengan metode BPMN maupun dengan metode flowcharting yang telah diatur dalam ketentuan PerMenPANRB nomor 19 tahun 2018.

Penataan birokrasi publik memasuki era millenium Bumi Aksara

The Complete Business Process Handbook is the most comprehensive body of knowledge on business processes with revealing new research. Written as a practical guide for Executives, Practitioners, Managers and Students by the authorities that have shaped the way we think and work with process today. It stands out as a masterpiece, being part of the BPM bachelor and master degree curriculum at universities around the world, with revealing academic research and insight from the leaders in the market. This book provides everything you need to know about the processes and frameworks, methods, and approaches to implement BPM. Through real-world examples, best practices, LEADing practices and advice from experts, readers will understand how BPM works and how to best use it to their advantage. Cases from industry leaders and innovators show how early adopters of LEADing Practices improved their businesses by using BPM technology and methodology. As the first of three volumes, this book represents the most comprehensive body of knowledge published on business process. Following closely behind, the second volume uniquely bridges theory with how BPM is applied today with the most extensive information on extended BPM. The third volume will explore award winning real-life examples of leading business process practices and how it can be replaced to your advantage. Learn what Business Process is and how to get started Comprehensive historical process evolution In-depth look at the Process Anatomy, Semantics and Ontology Find out how to link Strategy to Operation with value driven BPM Uncover how to establish a way of Thinking, Working, Modelling and Implementation Explore comprehensive Frameworks, Methods and Approaches How to build BPM competencies and establish a Center of Excellence Discover how to apply Social BPM, Sustainable and Evidence based BPM Learn how Value & Performance Measurement and Management Learn how to roll-out and deploy process Explore how to enable Process Owners, Roles and Knowledge Workers Discover how to Process and Application Modelling Uncover Process Lifecycle, Maturity, Alignment and Continuous Improvement Practical continuous improvement with the way of Governance Future BPM trends that will affect business Explore the BPM Body of Knowledge

*KOMPENSASI & SOP PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA Berdasarkan Aturan Pemerintah* RAS

On public administration in Indonesia with reference to the Indonesian administrative law.

Usaha untuk menemukan sistim pemerintahan daerah yang akseptabel dan workabel ISEAS-Yusof Ishak Institute

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang-undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar

Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas-entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekonsiliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN-Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan memfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen

Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep "User Defined Reporting" merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep "Performance Based Budgeting" yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.

#### **Petunjuk Praktis Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (K/L/Pemda)**

Prenada Media

Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan demokrasi; posisi dan peran pemerintah daerah dalam sistem birokrasi Indonesia dan berbagai isu yang terkait; serta strategi reformasi birokrasi serta kelembagaan di pemerintah Indonesia. \*\*\* Persembahkan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

#### **SOP Biro Administrasi Pimpinan sebagai juru bicara pimpinan Pemprov Jawa Barat**

Penerbit Andi

Buku Hukum Administrasi Negara ini ditulis dari pelbagai bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang lama dan terbaru. Disusun secara sistematis dari pokok pangkal paling dasar, yakni Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, lalu memasuki wilayah Hukum Administrasi Negara. Susunan ini sengaja digunakan untuk melihat Hukum Administrasi Negara secara lengkap dan

sempurna, yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.

*Kemampuan minimal seorang birokrat* Huta Publisher

Menurut pandangan humanisme, manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya pada tujuan yang positif dan rasional. Perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial budaya tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang. Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sebagai warga negara, kita tidak boleh hanya berpangku tangan mendiadakan proses pemerintahan yang mengarah pada terancamnya kerusakan peradaban lebih jauh yang menjadi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa Indonesia. Di bidang politik, kita menghendaki tegaknya tanggung jawab lembaga-lembaga politik atas mandat yang telah diberikan rakyat kepadanya. Etika administrasi publik merupakan etika yang mengatur bagaimana sebaiknya pelayan-pelayan masyarakat bekerja. Etika ini menuntut para pekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya di kemudian hari. Masih banyak mental bekerja dengan tidak baik yang masih menempel pada pekerja-pekerja administrasi publik ini. Hal ini tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan, pembentukan mental yang kurang terasah, dan faktor karakter seseorang. Buku etika administrasi publik ini menyajikan penjelasan-penjelasan mengenai pekerjaan administrasi publik. Dalam buku ini juga dijelaskan dasar-dasar hukum maupun undang-undang yang mengatur jalannya pekerjaan untuk pelayanan publik ini. Selain itu, buku ini juga menyajikan jenis pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh pelayan publik. Tidak hanya jenis pelanggaran, namun juga konsekuensi dari tindakan yang sudah merugikan masyarakat ini. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari Ilmu Pemerintahan seperti Administrasi Negara dan lain-lain. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang makin meningkatkan kualitas dan mental para pelayan publik, mengingat pekerjaan ini akan banyak melibatkan masyarakat.